



EDISI SELASA 14 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
S&P Afiriasi Peringkat Sovereign Indonesia pada Level Stabil

04

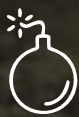
NUSANTARA
Kejagung Mendadak Hentikan Pengumpulan Data MBG

10

LISTSTYLE
Sayonara Rambut Lepek Cara Tepat Memakai Hair Oil

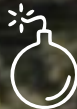
LAGI! SEKOLAH DIBAYANGI TEROR BOM

Hari pertama masuk sekolah yang sekaligus menandai dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berubah menjadi ketegangan massal. Gelombang ancaman bom menyasar lembaga pendidikan dasar di ibu kota, memicu kepanikan di tengah pelaksanaan upacara bendera Sekolah Dasar Negeri (SDN) Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meskipun kepolisian bergerak cepat meringkus pelaku peneror, bayang-bayang kecemasan telanjur menggelayuti ruang-ruang kelas. Rentetan teror bom yang menyasar institusi pendidikan sejatinya telah eskalatif sejak akhir tahun lalu. Pada Oktober 2025, Jakarta Nanyang School dan Mentari Intercultural School menerima ancaman bom serupa melalui WhatsApp dan surat elektronik yang disertai tuntutan tebusan sebesar US\$30.000 dalam bentuk Bitcoin, meski hasil sterilisasi kepolisian menunjukkan nihil bahan peledak. Pola intimidasi digital yang identik kemudian melanda North Jakarta Intercultural School (NJIS) di Kelapa Gading pada tahun yang sama, hingga puncaknya terjadi pada Desember 2025 saat 10 sekolah di Depok secara simultan menerima surel ancaman bom serupa, yang berujung pada penangkapan pelaku berinisial HRR dengan motif yang murni dilatari oleh persoalan pribadi dan dipastikan tidak terafiliasi dengan jaringan terorisme. Kehadiran negara dinantikan agar sekolah kembali menjadi tempat yang aman. **BACA HAL 11...**



November 2025

Bom rakitan berdaya rendah meledak di masjid SMAN 72 Jakarta. Pelaku siswa F (17), bertindak sendiri karena masalah pribadi dan paparan konten kekerasan, bukan jaringan terorisme.



Desember 2025:

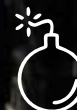
Sepuluh sekolah di Depok menerima email ancaman bom. Pelaku HRR ditangkap, motif pribadi, bukan terorisme.



2025:

North Jakarta Intercultural School (NJIS), Kelapa Gading menerima ancaman serupa. Polisi menduga pelaku yang sama. Hoaks.

Pria berinisial MY (34) yang mengirim ancaman teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan saat ditangkap polisi dan suasana pengamanan lokasi, Senin (13/6/2026). (Ist)



Oktober 2025:

Jakarta Nanyang School dan Mentari Intercultural School diancam bom lewat WhatsApp dan email disertai tebusan US\$30.000 dalam bitcoin. Hoaks.



13 Juli 2026:

SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa menerima ancaman bom di 11 titik. Hasil sterilisasi: tidak ditemukan bom.

Daftar**Ancaman Bom****di Sekolah****Indonesia**

S&P AFIRMASI PERINGKAT SOVEREIGN INDONESIA PADA LEVEL STABIL

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings resmi mempertahankan peringkat kredit sovereign Republik Indonesia pada level 'BBB' untuk jangka panjang dan 'A-2' untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) yang tetap berada di kategori stabil.

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings resmi mempertahankan peringkat kredit sovereign Republik Indonesia pada level 'BBB' untuk jangka panjang dan 'A-2' untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) yang tetap berada di kategori stabil.

Keputusan afirmasi peringkat investasi (investment grade) ini mencerminkan keyakinan kuat S&P bahwa pelemahan posisi eksternal dan fiskal Indonesia saat ini hanya bersifat sementara, sehingga daya tahan makroekonomi domestik dinilai masih cukup tebal untuk mengabsorpsi pembengkakan biaya impor serta fluktuasi nilai tukar yang menekan pasar modal nasional sepanjang semester pertama tahun ini.

Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan kondisi ekonomi akan membaik seiring dengan tren kenaikan harga komoditas global, pemulihan sektor penerimaan negara, serta implementasi kebijakan pemerintah yang dinilai semakin konsisten di lapangan.

"Kami menegaskan kembali (affirm) peringkat kredit sovereign Indonesia pada level 'BBB' untuk jangka panjang dan 'A-2' untuk jangka pendek," tulis S&P



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

dalam keterangan resminya dikutip Senin (13/6/2026).

Berdasarkan analisis S&P, pelemahan posisi fiskal dan eksternal Indonesia belakangan ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik, yang meliputi tingginya harga energi, kenaikan suku bunga tinggi, depresiasi nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang yang bertambah.

Meski demikian, tekanan tersebut dinilai masih berada dalam batas yang dapat diredam oleh otoritas keuangan dalam negeri melalui kombinasi kebijakan yang terukur.

"Posisi fiskal dan eksternal Indonesia yang melemah akibat tingginya harga energi, kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, dan akumulasi utang, bersifat sementara dan ber-potensi diredam oleh kenaikan harga komoditas serta pemangkasan belanja, menurut pandangan kami," tulis S&P.

Salah satu langkah strategis pemerintah yang mendapat sorotan positif dari lembaga pemeringkat ini adalah penguatan tata kelola di sektor sumber daya alam dan mineral. Kebijakan seperti sentralisasi pengelolaan

Peringkat Kredit RI (Investment Grade)

- Jangka Panjang: BBB
- Jangka Pendek: A-2
- Outlook: Stabil

Katalis Positif Ekonomi

- **Triwulan I-2026:**
Ekonomi tumbuh 5,6% (yoy).
- **Proyeksi 2026:**
Pertumbuhan 5,1%, PDB per kapita sekitar US\$5.200.
- **2026-2029:**
Rata-rata pertumbuhan 4,9% per tahun.
- **Pendapatan Negara:**
Naik 19% (5 bulan pertama 2026).
- **Perbankan:**
Kondisi tetap sehat.

Jangkar Kebijakan S&P

- **Disiplin Fiskal:**
Defisit dijaga di bawah 3% PDB.
- **Sektor SDA:**
Tata kelola diperketat untuk menekan kebocoran devisa.
- **PT Danantara Sumberdaya Indonesia:**
Diapresiasi karena menekan miss-invoicing dan transfer pricing.
- **Bank Indonesia:**
Dinilai independen dan efektif menjaga inflasi.

Menko Airlangga: Bukti Kepercayaan Global Terhadap Kebijakan Ekonomi RI

LEMBAGA pemeringkat internasional S&P Global Ratings resmi mengonfirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia tetap berada pada level 'BBB' untuk jangka panjang dan 'A-2' untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) yang stabil. Keputusan tersebut dipublikasikan melalui laporan Research Update bertajuk 'Indonesia Ratings Affirmed At 'BBB/A-2'; Outlook Stable' pada Senin, 13/6/2026.

Menanggapi rilis tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa afirmasi ini menjadi indikator valid atas kepercayaan komunitas internasional terhadap arah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan

ekonomi Pemerintah. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya.

Menurut Airlangga, penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional tersebut didorong oleh kemampuan nyata pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen.

Selain itu, komitmen dalam mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit anggaran di bawah level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), serta penguatan tata kelola di sektor sumber daya alam, menjadi jangkar penguat bagi ketahanan ekonomi domestik. Perpaduan langkah strategis ini dinilai memberikan sinyal positif yang sangat kuat bagi para investor global bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam posisi solid.

-invoicing dan transfer pricing. Kebijakan ini, yang berjalan beriringan

dengan pengetatan regulasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), diharapkan dapat memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di sektor moneter, S&P menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional yang kuat dan telah teruji berhasil menjaga tekanan inflasi tetap terkendali sejak dekade 2010-an. Penerapan bauran kebijakan moneter serta fleksibilitas nilai tukar yang dijalankan bank sentral dinilai memberikan ruang penyesuaian yang memadai dalam meredam rambatan guncangan eksternal. Sementara itu, risiko kontinjensi dari sistem keuangan bagi pemerintah dipandang relatif terbatas, mengingat total aset di sektor perbankan masih berada di bawah angka 60 persen dari PDB dan risiko negara pada sektor perbankan tetap bertahan di level yang terjaga dengan baik (wid,ist/dya)

komoditas serta pengetatan pengawasan operasional diproyeksikan mampu menopang dan mendorong pendapatan ekspor sekaligus mengamankan penerimaan negara dalam jangka panjang apabila dieksekusi secara konsisten.

"Kami meyakini upaya pemerintah untuk memusatkan pengelolaan serta mengurangi kebocoran di sektor sumber daya alam dan mineral pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor, terutama jika implementasi kebijakan semakin baik," lanjut lembaga pemeringkat tersebut.

Untuk sepanjang tahun ini, S&P memperkirakan penerimaan pemerintah akan terus melanjutkan tren pemulihan yang didukung oleh kenaikan harga komoditas dan membaiknya penerimaan dari sektor sumber daya alam. Komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah koridor 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai sebagai jangkar utama yang sangat krusial bagi stabilitas makroekonomi nasional. (wid,ktn,tmo/dya)

DPR RI CIUM AROMA INTERVENSI ELITE LOKAL

Kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki babak baru. Komisi III DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan mendasar dalam penanganan perkara tersebut, mulai dari perbedaan kronologi yang kontras, dugaan intimidasi berupa desakan surat perdamaian oleh oknum aparat, hingga indikasi intervensi elite lokal.

Sederet persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut dihadiri langsung oleh keluarga korban, kuasa hukum, serta perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram.

Peristiwa yang terjadi pada 13 Desember 2025 itu mengakibatkan dua santri, yakni ADR (14) dan SAH (12), mengalami luka bakar serius, serta MYS (14) mengalami luka ringan. Sementara itu, satu korban lain berinisial MSS (13) dinyatakan meninggal dunia pada 19 Februari 2026 setelah menjalani perawatan intensif.

Kejanggalan pertama yang disoroti oleh parlemen adalah adanya perbedaan narasi yang sangat kontras antara versi keluarga korban dan versi Kementerian Agama (Kemenag) yang bersumber dari pihak pesantren.

Anggota Komisi III DPR RI Hince Panjaitan saat membacakan resume kronologi menjelaskan, pihak keluarga meyakini peristiwa tersebut mengandung unsur kesengajaan dan didahului oleh tindakan perundungan (bullying) yang berulang.

Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku yang merupakan santri senior diduga menyimpan dendam setelah dilaporkan oleh korban kepada pengurus pesantren akibat aksi per-undungan. Pelaku kemudian meng-ancam akan membakar korban, meng-giring mereka ke sebuah ruangan kosong, lalu menyulut bahan bakar hingga memicu kebakaran hebat.



Ketua Komisi III Habiburokhman bersalaman dengan santri korban pembakaran Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026).ist

Sebaliknya, penjelasan resmi yang diterima Kemenag dari pihak pesantren mengklaim bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan murni. Peristiwa disebut bermula dari aktivitas para santri yang sedang membuat ketapel, yang kemudian memicu kebakaran akibat ketidaksengajaan dari tumpahan bensin.

Hince menegaskan, perbedaan narasi yang mendasar ini harus diuji secara mendalam melalui proses hukum. "Perbedaan versi tersebut harus menjadi salah satu fokus penyidikan untuk memastikan fakta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan hasil penyidikan yang independen," ujar Hince.

Soroti Desakan Surat Damai

Selain persoalan kronologi, Komisi III DPR RI juga mengkritik keras lambanya penanganan perkara oleh aparat penegak hukum setempat. Perkara ini dinilai baru mendapatkan atensi serius setelah salah satu korban

meninggal dunia dan kasusnya viral di media sosial.

Di hadapan anggota dewan, ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan adanya tekanan psikologis dan upaya dari oknum kepolisian yang menyodorkan surat perdamaian agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke ranah pidana.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengonfirmasi adanya temuan tersebut di dalam rapat. Menurut dia, langkah oknum aparat yang mencoba menyelesaikan kasus kekerasan fatal terhadap anak di bawah umur melalui jalur damai merupakan bentuk kejanggalan besar.

"Itu kan saya buka. Nalar hukum dan insting saya melihat ada upaya untuk menutupi kasus ini. Mengapa harus menunggu viral baru berjalan serius? Bahkan ada indikasi pihak keluarga dihambat di bandara saat hendak berangkat ke Jakarta untuk mencari keadilan," kata Abdullah.

Abdullah menduga ada pengaruh dari kekuatan elite tertentu yang membuat penanganan kasus ini sempat berjalan di tempat. Ia mengaitkannya dengan dinamika kultural di NTB, mengingat pondok pesantren tersebut berada di bawah naungan jaringan Nahdlatul Wathan (NW), sebuah organisasi kemasyarakatan dengan basis massa

FAKTA KASUS PEMBAKARAN SANTRI DI LOMBOK TENGAH

Peristiwa

- Terjadi di Ponpes Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Lombok Tengah, 13 Desember 2025.
- Penanganan kasus kini diambil alih Polda NTB.

Korban

- MSS (13): Meninggal dunia (19 Feb 2026).
- ADR (14) & SAH (12): Luka bakar berat.
- MYS (14): Luka bakar ringan.

Tiga Kejanggalan

- Versi berbeda:** Kecelakaan bensin vs dugaan pembakaran akibat perundungan.
- Dugaan intimidasi:** Keluarga disebut diminta menandatangani surat damai.
- Dugaan intervensi:** Keluarga dihambat saat hendak mencari keadilan ke Jakarta.

Status Hukum

- MR (15): Santri senior, diduga pelaku utama.
- AM/AMR (55): Pimpinan ponpes, diduga lala.
- Keduanya dijerat Pasal 359/360 KUHP; DPR mendorong evaluasi pasal sesuai fakta kasus.

dan lembaga pendidikan yang sangat besar di wilayah tersebut sejak 1953.

"Kulturnya di NTB itu kan jemaah NW luar biasa dominan. Nalar politik dan insting saya melihat ada keterkaitan intervensi dari elite untuk menyelamatkan oknum tertentu, mengingat rekam jejak historis dan pengaruh politik jaringan ini yang kuat di daerah," tutur Abdullah.

Guna menjaga objektivitas dan transparansi, Komisi III DPR RI secara resmi meminta Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk mengambil alih seluruh proses penyidikan dari Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah.

Sejauh ini, Polres Lombok Tengah telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu MR (15), seorang santri senior, dan AM (55), pimpinan pondok pesantren. Keduanya dijerat dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 ayat (1) KUHP juncto Pasal 474 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat dan meninggal dunia.

Polisi menyebut MR abai terhadap peringatan rekan-rekannya, sementara AM dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Kendati demikian, DPR meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui unsur pengawasan penyidikan untuk mengevaluasi total penanganan perkara ini. (tin,rls,ant/dya)



KEJAGUNG MENDADAK

HENTIKAN PENGUMPULAN DATA MBG

Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait sengkaret program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Langkah mendadak ini memicu pertanyaan di tengah bergulirnya penyidikan megakorupsi di internal Badan Gizi Nasional (BGN).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Penghentian Pengumpulan Data dan Keterangan Permasalahan Program MBG yang diterbitkan pada Jumat, 10 Juli 2026.

Surat yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Syarif Sulaeman Nahdi itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan penerbitan instruksi penarikan pasukan di daerah tersebut. "Benar surat itu dikeluarkan," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2026).

Menurut Anang, penghentian operasi intelijen dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ini dilakukan karena tenggat waktu penelusuran di tingkat daerah telah habis. Alasan lain, kata dia, adalah untuk mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum jaksa di lapangan. "Karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu di-keluarkan supaya tidak disalah-gunakan dalam pelaksanaannya," ujar Anang.

Sebelum surat penghentian ini keluar, jajaran Kejaksaan Tinggi diinstruksikan untuk menginventarisasi dan memetakan segala bentuk penyimpangan serta kendala dalam pelaksanaan program prioritas tersebut. Data-data dari daerah ini awalnya dirancang untuk menyuplai bukti bagi tim penyidik Gedung Bundar dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola BGN periode anggaran 2025-2026.

Meski perburuan data di daerah disetop, Anang menjamin hal tersebut tidak akan mengembosik penyidikan utama. Dokumen dan alat bukti yang telanjur dihimpun sebelum 10 Juli bakal langsung ditarik ke pusat demi memperkuat pembuktian materiil guna menjerat para tersangka. "Tentunya data-data yang sudah terkumpul yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung," tutur Anang.

Hingga saat ini, korps adhyaksa telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam pusaran korupsi lembaga pangan tersebut. Tersangka teranyar yang diumumkan adalah Asep Yusuf Somantri (AYS), pihak swasta yang dituding sebagai perantara atur proyek.

Dengan terbitnya surat penutupan pulbaket di daerah, fokus penanganan

perkara kini sepenuhnya ditarik ke Jakarta. Tim penyidik JAM Pidsus mengklaim penutupan posko data di daerah ini justru dilakukan untuk mempercepat lokalisasi pembuktian demi menyeret ketujuh tersangka ke pengadilan tipikor.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kualitas gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama saat pelaksanaan program kembali dimulai usai masa libur sekolah.

Komitmen tersebut disampaikan

Wakil Kepala BGN Trenggono saat meninjau pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Pusat, Senin (13/6/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari penyusunan menu, keamanan pangan, hingga proses distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas kandungan gizi

pada setiap menu yang disajikan. Menurutnya, protein hewani harus tetap menjadi bagian dari menu harian guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.

"Kami ingin memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang lengkap dan seimbang. Karena itu, menu berbahan protein hewani, termasuk daging, perlu diupayakan tersedia secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan, kecukupan gizi, dan ketersediaan bahan baku di masing-masing daerah," katanya.

Sejumlah lokasi yang dikunjungi dalam peninjauan tersebut antara lain SDN Cikini 01, SDN Cikini 02, SMA Muhammadiyah 1, SPPG Jakarta Pusat Menteng Pegangsaan 1, serta SPPG Jakarta Pusat Johar Baru Kampung Rawa 2. (tin, ist, kum/dya)



Teka-teki Kematian Kepala SPPG di Parkiran Mal Bandung

KEMATIAN Sopyan Fathurohman (26) meninggalkan duka mendalam sekaligus teka-teki besar bagi rekan kerjanya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rancamulya 02, Kabupaten Bandung. Pria yang menjabat sebagai kepala salah satu unit krusial dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) ini ditemukan meninggal dunia di area parkir Kings Shopping Center, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/7/2026) pagi.

Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh petugas teknis dan personel keamanan pusat perbelanjaan tersebut sekitar pukul 06.30 WIB. Tubuh Sopyan ditemukan dalam kondisi tergantung di tembok pembatas parkir Lantai 12 gedung tersebut.

Kepala Kepolisian Sektor Regol Kompol Megawati Triyanti membenarkan adanya laporan penemuan jasad tersebut. Setelah

menerima informasi dari saksi di lapangan, pihak kepolisian bersama Tim Inafis segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Betul ada kejadian, pada Minggu 12 Juli, sekitar pukul 06.30 WIB kita dapat informasi dari lantai 12 parkir Kings dari saksi teknis dan sekuriti," kata Megawati saat dikonfirmasi, Senin (13/7/2026).

Di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti milik korban, meliputi telepon genggam, sandal, Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta sepucuk surat wasiat tulisan tangan yang berisi permohonan maaf. Berdasarkan identitas pada KTP, korban diketahui masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Usai diidentifikasi di lokasi, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Pihak keluarga menyatakan telah menerima kejadian ini sebagai

DAFTAR TUJUH TERSANGKA YANG TELAH DIJERAT KEJAKSAAN AGUNG:

- **Dadan Hindayana**
(Mantan Kepala BGN)
- **Sony Sonjaya**
(Mantan Wakil Kepala BGN)
- **Lodewyk Pusung**
(Mantan Wakil Kepala BGN)
- **Asep Yusuf Somantri**
(Pihak swasta/orang dekat Sony Sonjaya)
- **Andri Mulyono**
(Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, penyedia motor listrik BGN)
- **Glory Harimas Sihombing**
(Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review/IFSR)
- **Lalu Muhammad Iwan**
(Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN)

musibah dan membuat surat pernyataan resmi.

Kabar kematian Sopyan mengejutkan lingkungan tempatnya bekerja. Pasalnya, tata kelola dan operasional dapur pemenuhan gizi yang ia pimpin di Jalan Mengger, Rancamulya, dilaporkan berjalan tanpa kendala.

Fazri, pemilik dapur sekaligus mitra SPPG Rancamulya 02, mengaku sangat terpukul. Ia mengenal Sopyan sejak pertama kali dapur tersebut didirikan pada September 2025.

Sepanjang ingatan Fazri, Sopyan semula dikenal sebagai sosok yang ceria, komunikatif, dan gemar berkelakar. Namun, awan mendung tampaknya mulai bergelayut di benak Sopyan dalam beberapa bulan terakhir. (tin, rls, kum/dya)

MENCARI JEJAK FEBRIE USAI RESMI TERSANGKA

Keberadaan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah kimenjadini misteri besar setelah terakhir kali terlihat publik saat konferensi pers pada Jumat, 10 Juli 2026 pukul 13.15 WIB. Dinamika kasusnya bergulir kilat setelah pada Sabtu, 11 Juli 2026, Febrie resmi mengundurkan diri bersamaan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Merespons situasi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi langsung memberlakukan status cegah ke luar negeri selama 20 hari sejak Jumat, 11 Juli 2026 guna mengantisipasi celah pelarian.

Hingga saat ini, titik keberadaan Febrie masih memicu simpang siur dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Di saat pihak keluarga bersikukuh mengaku tidak tahu-menahu di mana lokasi Febrie, pihak Kejaksaan justru menegaskan bahwa mantan petingginya itu dipastikan masih berada di dalam negeri.

Pernyataan tersebut sekaligus membentuk rumor yang viral di media sosial bahwa Febrie telah bertolak ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah, di tengah situasi senyap yang kini diantisipasi sebagai persiapan langkah penegakan hukum lanjutan.

Namun, Kejaksaan Agung memastikan Febrie masih berada di Indonesia, bersikap kooperatif, dan berada dalam pemantauan penyidik.

Tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta menegaskan hingga saat ini dirinya masih menjalankan tugas dan Jampidsus tetap fokus untuk penyelesaian pemberkasian perkara, khususnya yang menjadi perhatian publik."

Sehari setelah pernyataan tersebut, dinamika hukum berubah. Pada Sabtu dini hari (11/7/2026), Febrie mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus. Pengunduran diri itu diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Pada hari yang sama, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan penetapan Febrie Adriansyah dan pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka.

Penetapan tersebut berkaitan dengan penyidikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi, antara lain dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap periode 2018-2026, dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel dan dugaan pencucian uang terkait penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Untuk mendukung proses penyidikan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Febrie dan DR.



Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut pencegahan dilakukan selama 20 hari berdasarkan permohonan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrim tertanggal 11 Juli 2026.

"Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (swasta). Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai

peraturan perundang-undangan," kata Hendarsam di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Meski telah dicegah ke luar negeri, informasi mengenai keberadaan Febrie tetap menjadi perhatian publik. Salah satu kabar yang beredar menyebut Febrie telah melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk umrah setelah mengundurkan diri dari jabatannya.

Kabar tersebut dibantah oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna memastikan Febrie masih berada di dalam negeri dan tidak bepergian ke luar negeri.

"Enggak benar itu (isu umrah). Yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak ke luar negeri, kooperatif, dan dalam pantauan penyidik," ujar Anang dalam konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (13/7/2026).

Anang menjelaskan status Febrie sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih melekat hingga terdapat keputusan hukum tetap. Sementara jabatan Jampidsus telah ditinggalkan setelah pengunduran dirinya diterima.

"Masih (ASN). Kalau sudah ada indikasi sampai inkrah biasanya baru. Tapi terhadap jabatannya, beliau sudah secara sukarela mengundurkan diri. Yang penting itu sudah lepas dari jabatan," ujarnya.

Terkait penanganan perkara, Kejaksaan Agung akan membentuk tim penyidik untuk melanjutkan proses hukum setelah pelimpahan administrasi perkara selesai dilakukan. (tin,ist,rls,kum/dya)

Istana Belum Terima Usulan Pengganti Jampidsus

PERGANTIAN mendadak di posisi strategis Kejaksaan Agung Indonesia membuka babak baru dalam penanganan sejumlah perkara korupsi besar. Setelah Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kursi pengendali pemberantasan korupsi di tubuh Kejaksaan kini menunggu pengganti definitif.

Hingga Senin (13/7/2026), Presiden Prabowo Subianto belum menerima usulan nama calon Jampidsus baru dari Jaksa Agung. Untuk sementara, posisi tersebut dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Rudi Margono.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengisian jabatan Jampidsus harus melalui mekanisme pengangkatan oleh Presiden berdasarkan usulan Jaksa Agung.

"Jabatan tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres berdasarkan usulan dari Jaksa Agung. Sampai hari ini kami belum menerima usulan tersebut," ujar Prasetyo.

Kekosongan posisi tersebut terjadi saat Kejaksaan tengah menghadapi tantangan besar. Institusi ini harus melanjutkan penanganan perkara yang menyeret mantan pejabat tingginya sendiri, termasuk dugaan korupsi dalam sejumlah sektor strategis.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan dapat membuat proses hukum berjalan lebih cepat karena fungsi penyidikan dan penuntutan berada dalam satu institusi.

Namun, Yusril menilai kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, aspek

paling penting adalah memastikan proses hukum berjalan independen dan transparan.

"Yang menjadi perhatian publik adalah apakah Kejaksaan Agung akan menangani perkara ini secara sungguh-sungguh, mengingat tersangkanya merupakan mantan Jampidsus," kata Yusril.

Keputusan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyerahkan kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) ke Kejaksaan Agung memicu polemik hukum yang tajam. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa mekanisme yang terjadi di lapangan bukanlah bentuk pelimpahan perkara konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan sebuah penyerahan atau pengalihan kewenangan antar lembaga. (wid,ist/dya)

Koperasi Belum Deal Soal Honor Sopir, Angkutan Pelajar Molor Lagi?

MALANG - Rencana pengoperasian layanan angkutan gratis bagi pelajar di Kota Malang kembali berpotensi molor. Hingga pertengahan Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) masih belum mencapai kesepakatan terkait mekanisme pembayaran honor sopir melalui koperasi.

"Kami masih menunggu pemerintah, istilahnya tinggal memfinalisasi mekanisme pembayaran subsidi kepada sopir angkutan melalui koperasi," ujar Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, Senin (13/7/2026).

Sebagai informasi, layanan angkutan gratis bagi pelajar ditargetkan beroperasi pada Februari 2026, namun rencana tersebut molor hingga Juni 2026. Pemkot Malang beralasan, tertundanya program yang melibatkan 80 angkota tersebut dikarenakan m masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai dasar penyusunan Perwali.

Purwono menambahkan, pem-

bahasan skema pembayaran dijadwalkan berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang dalam pekan ini. Hasil rapat tersebut akan menjadi dasar sebelum program resmi dijalankan di bulan Juli ini.

Pria yang akrab dengan sapaan Ipung tersebut mengatakan, sebanyak empat koperasi ditunjuk untuk mengelola layanan angkutan pelajar, yakni Koperasi Jasa Trans Jaya Makmur, Koperasi Al Setia Kawan, Koperasi Anugerah Djaya Langgeng, dan Koperasi Gawe Rukune Dhulur.

Namun hingga kini belum seluruh koperasi menyepakati mekanisme pembayaran kepada para sopir. "Dua koperasi sudah memastikan akan membayar setiap hari kepada sopir, kemudian setiap bulan mereka menagih ke Pemkot Malang. Sementara dua koperasi lainnya belum mengambil keputusan," katanya.

Untuk menyederhanakan administrasi, Organda mengusulkan agar pengelolaan keuangan 4 koperasi dilakukan melalui satu manajemen. Menurut Ipung, langkah tersebut dinilai lebih efisien sekaligus dapat menekan biaya administrasi.

"Saya usulkan dikelola satu manajemen supaya lebih mudah dan hemat. Kalau setiap koperasi membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tentu biaya administrasinya lebih besar," katanya.

Meski demikian, pihaknya mengakui usulan tersebut masih harus dibahas bersama seluruh pihak karena belum tentu disepakati.

"Karena banyak pihak yang terlibat, memang perlu beberapa kali rapat untuk menyatukan suara.

Harapan kami setelah rapat ini sudah ada keputusan sehingga program bisa segera berjalan," tambahnya.

Selain skema pembayaran, kesiapan sistem pemantauan operasional armada juga telah dirampungkan. Nantinya setiap pengemudi hanya perlu menghubungkan telepon genggam mereka dengan aplikasi yang telah



Ilustrasi: Sejumlah angkutan kota (angkot) akan dimanfaatkan sebagai armada antar jemput gratis bagi pelajar di Kota Malang. (Santi/Lentera)

disiapkan sehingga pergerakan armada dapat dipantau secara real time. Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan pembayaran jasa sopir tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah. Karena itu, penyaluran anggaran dilakukan melalui koperasi sebagai pihak ketiga. (Santi/Dya)

Tangkapan Nelayan Sedikit, TPI Pujiharjo Malang Belum Beroperasi

Ilustrasi: Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Malang. (foto: ist)



MALANG - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pujiharjo di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, hingga kini belum juga beroperasi. Fasilitas tersebut sebelumnya ditargetkan mulai melayani pelelangan pada pertengahan Mei 2026. Penyebabnya, hasil tangkapan nelayan masih terlalu sedikit sehingga belum memenuhi syarat untuk dipasarkan melalui mekanisme lelang.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, mengatakan hasil tangkapan nelayan

dalam beberapa bulan terakhir didominasi ikan berukuran kecil dengan volume yang masih rendah.

"Nelayan rata-rata hanya memperoleh sekitar 30 hingga 50 kilogram ikan, seperti tongkol dan lemuru. Jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan untuk dilakukan pelelangan," ujar Victor, Senin (13/7/2026).

Dijelaskannya, pelelangan baru dapat dilaksanakan apabila hasil tangkapan mencapai sedikitnya 200 kilogram untuk ikan berukuran kecil atau 50 kilogram untuk ikan berukuran besar.

Karena itu, pihaknya berharap musim ikan yang diperkirakan mulai berlangsung pada Juli 2026 dapat mendorong operasional TPI Pujiharjo. "Mudah-mudahan mulai Juli 2026 ini sudah musim ikan sehingga pelelangan bisa aktif dilakukan untuk ikan-ikan hasil tangkapan nelayan," katanya.

Victor menilai, keberadaan TPI Pujiharjo menjadi semakin penting di tengah perubahan pola penerimaan daerah setelah diberlakukannya skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan.

Menurutnya, kapal perikanan yang menggunakan izin pemerintah pusat wajib membayar PNBP sebesar 5 persen. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah tidak lagi dapat menarik retribusi TPI dari kapal-kapal tersebut untuk menghindari pungutan ganda.

Saat ini, terdapat sekitar 120 kapal perikanan di Kabupaten Malang yang beroperasi menggunakan izin pemerintah pusat dan seluruhnya menjadi objek PNBP. Sementara itu, retribusi TPI hanya dapat dipungut dari nelayan yang menggunakan izin penangkapan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kondisi tersebut membuat ruang penerimaan daerah dari sektor pelelangan ikan semakin terbatas sehingga pemerintah daerah perlu

mengoptimalkan potensi TPI yang ada, termasuk TPI Pujiharjo.

Pada 2026, lanjut Victor, Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan retribusi TPI sebesar Rp200 juta. Namun hingga April 2026, realisasinya baru mencapai Rp45,72 juta atau sekitar 22,85 persen dari target.

Selain diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), TPI Pujiharjo juga diproyeksikan mampu memperbaiki tata kelola perdagangan hasil perikanan melalui sistem lelang yang lebih transparan.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mempersingkat rantai distribusi, menjaga mutu hasil tangkapan, sekaligus meningkatkan nilai jual ikan di tingkat nelayan.

"Tetapi kami terus berupaya dengan tidak hanya memastikan TPI Pujiharjo segera beroperasi, namun juga menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan. Harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendongkrak penerimaan daerah," pungkas Victor. (Santi/Dya)



TRAGIS, 27 ORANG TEWAS DALAM KEBAKARAN BAR BANGKOK

Kebakaran hebat melanda sebuah restoran dan bar populer, Rong Beer Na Lat Phrao, di Distrik Chatuchak, Bangkok, pada Senin (13/07/2026) dini hari. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 27 orang tewas dan lebih dari 60 orang lainnya luka-luka. Otoritas setempat mengonfirmasi delapan di antara korban luka saat ini berada dalam kondisi kritis.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan bahwa kebakaran dilaporkan terjadi sesaat setelah tengah malam, sekitar pukul 23.30 waktu setempat. Berdasarkan laporan awal tim penyelamat, korban meninggal terdiri dari 18 perempuan dan 9 laki-laki.

Direktur Departemen Penanggulangan Bencana Bangkok, Suriyachai Raviwan, menjelaskan bahwa mayoritas korban tewas akibat menghirup asap beracun. Banyak jenazah ditemukan di area toilet bagian belakang bangunan, tempat para pengunjung mencoba berlindung dari kobaran api.

Menurut keterangan PM Anutin yang dihimpun dari kesaksian seorang musisi di lokasi, api diduga kuat

berasal dari korsleting pada panel sakelar listrik di dekat panggung. Percikan api tersebut memicu ledakan kecil dan dengan cepat merambat ke seluruh ruangan melalui material

dekorasi langit-langit yang mudah terbakar, sekaligus memutus aliran listrik bangunan.

Gubernur Bangkok Chatchart Sittipunt, yang meninjau lokasi

Kemlu Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam kebakaran hebat yang melanda sebuah tempat hiburan di kawasan Lat Phrao, Distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok berkoordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan otoritas Thailand.

"Berdasarkan koordinasi KBRI Bangkok dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan otoritas setempat, belum terdapat informasi adanya korban Warga Negara

Indonesia (WNI) yang meninggal maupun korban luka," ujar Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah dalam keterangan tertulis, Senin (13/6).

Meski tidak ada WNI yang menjadi korban, tragedi tersebut menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan data terbaru otoritas Thailand, sedikitnya 27 orang meninggal dunia dan 63 lainnya mengalami luka-luka, dengan puluhan korban berada dalam kondisi kritis akibat luka bakar maupun menghirup asap.

Heni menegaskan KBRI Bangkok akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Perwakilan RI juga siap memberikan pendampingan apabila di kemudian hari ditemukan ada WNI yang terdampak musibah tersebut.

Sementara itu, kesaksian para penyintas menggambarkan bagaimana kebakaran berubah menjadi bencana

kejadian pada Senin pagi, menambahkan bahwa tim forensik sedang menyelidiki laporan terkait adanya hambatan fisik pada akses keluar. Beberapa korban ditemukan tidak sadarkan diri di dekat pintu darurat, yang diduga terhalang oleh susunan meja atau barang-barang interior bar.

Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengendalikan api. Hingga saat ini, area bar masih dipasang garis polisi untuk kepentingan investigasi menyeluruh oleh tim forensik.

Insiden ini kembali memicu sorotan publik internasional terkait penegakan standar keselamatan bangunan dan instalasi kelistrikan di Thailand. Peristiwa ini melengkapi daftar panjang tragedi serupa di tempat hiburan malam negara tersebut, setelah kebakaran di Mountain B Bar pada 2022 yang menewaskan 22 orang, dan Klub Santika pada 2009 yang merenggut 66 korban jiwa. (gus,ist,bbc/dya)



dalam hitungan menit. Seorang saksi mengaku awalnya melihat asap mengepul dari area dekat panggung sebelum terdengar suara ledakan yang diikuti padamnya aliran listrik. Dalam kondisi gelap, api dan asap tebal dengan cepat memenuhi ruangan sehingga memicu kepanikan pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri.

Sejumlah pengunjung berlarian menuju bagian belakang bangunan untuk mencari jalan keluar. Namun, banyak di antaranya justru terjebak di area toilet yang tidak memiliki akses evakuasi lain. Petugas penyelamat kemudian menemukan sejumlah korban dalam kondisi tidak bernyawa di lokasi tersebut setelah api berhasil dipadamkan.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan sebagian besar korban meninggal akibat menghirup asap. (gus,ap/dya)





Siasat Teh Hijau Penjaga Hati

Di dalam sistem metabolisme tubuh manusia, hati bertindak bagaikan gerbang bea cukai yang tak pernah tidur. Terletak persis setelah saluran pencernaan, organ vital ini memegang kendali penuh sebagai pihak pertama yang menyaring, memproses, dan mendistribusikan apa pun yang dikonsumsi manusia sebelum zat-zat tersebut dilepas menuju bagian tubuh lainnya.

Mulai dari memproduksi cairan empedu untuk memecah lemak, mengatur kadar gula darah dan kolesterol, hingga menetralkan racun, hati memikul beban kerja yang masif.

Di tengah tingginya kesadaran gaya hidup sehat modern, teh hijau kerap ditempatkan sebagai minuman detoksifikasi nomor satu yang dipercaya mampu meringankan beban kerja tersebut. Namun, hubungan antara konsumsi teh hijau dan kesehatan hati sebenarnya menyimpan sains yang kompleks.

Efeknya tidak serta-merta, melainkan sangat bergantung pada seberapa banyak kuantitas yang ditenggak, cara penyajian, faktor genetik, hingga kondisi kesehatan dasar sang konsumen.

Laporan klinis menunjukkan bahwa perlindungan terbesar dari teh hijau tidak didapatkan secara instan. Ahli gizi Diana Cusa, MS., RD., CDN., menggarisbawahi bahwa efek jangka pendek--dalam hitungan hari hingga minggu--hanya terjadi di tingkat seluler dan sering kali tidak langsung memicu perubahan signifikan pada fungsi hati secara makro. Manfaat protektif yang sesungguhnya baru

akan terbangun secara kokoh jika teh hijau dikonsumsi secara konsisten dalam hitungan bulan hingga tahunan.

Melawan Stres Oksidatif

Di tingkat molekuler, kekuatan utama teh hijau terletak pada tingginya kandungan antioksidan dari golongan polifenol yang disebut katekin. Salah satu senyawa turunan katekin yang paling agresif adalah Epigallocatechin gallate (EGCG). Senyawa inilah yang menjadi aktor utama dalam menetralkan radikal bebas. Diketahui radikal bebas adalah molekul tidak stabil pemicu kerusakan sel yang menjadi biang keladi berbagai penyakit kronis.

"Antioksidan dalam teh hijau (EGCG) dapat memberikan pengaruh pada hati dengan membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan," papar Mckenzie Dryden, ahli gizi terdaftar di HonorHealth Whole Health Institute.

Dalam jangka panjang, stres oksidatif yang dibiarkan tanpa peredam akan mempercepat penuaan sel dan memperburuk gangguan hati. Salah satu yang paling diwaspadai dalam dunia medis saat ini adalah metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD), atau yang dahulu akrab dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkohol.

Pengereman Lemak

Selain sebagai tameng antiinflamasi, teh hijau ikut mengintervensi cara hati mengelola lemak tubuh. Hati adalah regulator utama yang menentukan apakah lemak akan diproduksi, disimpan, atau

langsung disalurkan ke seluruh tubuh sebagai energi. Ketika fungsi kontrol ini terganggu, lemak akan menumpuk di dalam jaringan hati dan memicu MASLD.

Di sinilah teh hijau masuk memperbaiki metabolisme lipid. Seduhan daun ini bekerja dengan dua cara simultan: meningkatkan pembakaran lemak aktif sekaligus menghambat pembentukan jaringan lemak baru.

"Teh hijau dapat mengaktifkan enzim tertentu yang memberi sinyal pada sel untuk membakar lemak sebagai sumber energi, alih-alih menyimpannya, serta menghambat enzim yang berperan dalam sintesis lemak," jelas Diana Cusa.

Dengan stimulasi enzim tersebut, hati dirangsang untuk memproses lipid secara lebih efisien sehingga penumpukan lemak yang merusak jaringan organ dapat diminimalisir.

Waspada Kandungan Kafeinnya

Kendati menawarkan segudang manfaat seluler, teh hijau tidak bebas dari catatan peringatan. Sifat dasar teh hijau yang secara alamiah mengandung kafein menuntut kedisiplinan takaran dari konsumennya. Kafein memiliki sifat diuretik yang merangsang ekskresi cairan tubuh melalui urine.

Jika dikonsumsi berlebihan--melebihi ambang batas 400 mg kafein per hari--tubuh justru berisiko mengalami dehidrasi kronis.

Secara rata-rata, secangkir teh hijau seduh mengandung sekitar 30 hingga 50 mg kafein. Batas toleransi tubuh mayoritas orang dewasa setara dengan maksimal delapan cangkir per

hari. Namun, demi mendapatkan efektivitas terbaik bagi kesehatan hati tanpa membebani ginjal dan jantung, para ahli gizi lebih merekomendasikan moderasi ketat yaitu dua hingga lima cangkir teh hijau seduh per hari.

Selain variasi metabolisme harian, ada risiko yang jauh lebih serius yang mengintai ketika teh hijau dikonsumsi secara tidak bijak. Pada beberapa kasus langka yang dicatat dalam berbagai jurnal toksikologi, konsumsi ekstrak teh hijau dalam bentuk suplemen dosis tinggi (bukan seduhan daun alami) justru berpotensi memicu toksisitas hati (hepatotoxicity).

Kondisi ini umumnya disebabkan oleh akumulasi senyawa Epigallocatechin gallate (EGCG), salah satu jenis katekin paling kuat dalam teh hijau. Ketika dikonsumsi dalam bentuk ekstrak atau pil diet, kadar EGCG yang masuk ke dalam tubuh melonjak drastis hingga puluhan kali lipat dari secangkir teh biasa. Beban EGCG yang terlalu pekat ini sering kali melampaui ambang batas kemampuan filtrasi hati, sehingga memicu stres oksidatif pada sel-sel hati (hepatosit) dan menyebabkan kerusakan jaringan.

Oleh karena itu, cara terbaik untuk menikmati khasiat teh hijau adalah dengan kembali ke metode tradisional, yaitu menyeduh daun teh alami secukupnya. Menghindari konsumsi suplemen saat perut kosong juga sangat disarankan, karena penyerapan EGCG yang terlalu cepat dalam kondisi lambung kosong dapat memperberat kerja hati secara mendadak. (far/ist/dya)

Catat Cara Hemat Kuota Internet agar Tak Cepat Habis

Internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada koneksi data, mulai dari berkomunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, mengikuti perkuliahan atau rapat daring, mencari informasi, berbelanja, hingga menikmati hiburan melalui layanan streaming. Karena itu, kuota internet menjadi kebutuhan pokok yang harus dikelola dengan bijak. Tanpa disadari, penggunaan yang berlebihan sering kali membuat kuota cepat habis sebelum masa aktifnya berakhir.

Akibatnya, pengguna harus membeli paket data tambahan yang tentu menambah pengeluaran bulanan. Padahal, dengan menerapkan beberapa kebiasaan sederhana, penggunaan kuota dapat ditekan tanpa mengurangi kenyamanan saat berselancar di dunia digital.

Pantau penggunaan data secara berkala

Langkah pertama untuk menghemat kuota adalah mengetahui aplikasi mana yang paling banyak mengonsumsi data internet. Hampir semua ponsel Android maupun iPhone menyediakan fitur statistik penggunaan data pada menu pengaturan.

Manfaatkan jaringan Wi-Fi kapan pun tersedia

Jika berada di rumah, kantor, kampus, atau tempat umum yang menyediakan jaringan Wi-Fi yang aman, manfaatkan koneksi tersebut untuk aktivitas yang membutuhkan

data besar. Mengunduh dokumen, memperbarui aplikasi, melakukan pencadangan data, atau menonton video akan jauh lebih hemat jika dilakukan melalui Wi-Fi dibandingkan menggunakan data seluler.

Hindari mengunduh file berukuran besar menggunakan data seluler

File video berkualitas tinggi, permainan digital, maupun dokumen berukuran besar dapat menguras kuota hanya dalam hitungan menit. Karena itu, biasakan mengunduh file tersebut ketika perangkat telah terhubung ke jaringan Wi-Fi sehingga kuota internet tetap terjaga untuk kebutuhan yang lebih penting.

Hapus aplikasi yang sudah tidak digunakan

Banyak aplikasi tetap aktif di latar belakang meskipun jarang dibuka. Aplikasi tersebut dapat terus melakukan sinkronisasi data, mengirim notifikasi, atau memperbarui konten secara otomatis. Menghapus aplikasi yang tidak lagi diperlukan tidak hanya menghemat kuota internet, tetapi juga memperbesar ruang penyimpanan dan meningkatkan kinerja perangkat.

Nonaktifkan fitur unduhan otomatis

Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, maupun layanan surat elektronik umumnya mengunduh foto, video, atau dokumen secara otomatis. Jika fitur ini dibiarkan aktif, kuota internet akan cepat terkuras tanpa disadari. Menonaktifkan auto-download memungkinkan pengguna memilih sendiri file mana yang benar-

benar perlu diunduh.

Atur pembaruan aplikasi agar hanya melalui Wi-Fi

Pembaruan aplikasi memang penting untuk menjaga keamanan dan performa perangkat. Namun, ukuran file pembaruan sering kali cukup besar. Oleh sebab itu, ubahlah pengaturan agar proses pembaruan hanya berlangsung saat ponsel terhubung ke jaringan Wi-Fi, sehingga data seluler tidak terpakai secara berlebihan.

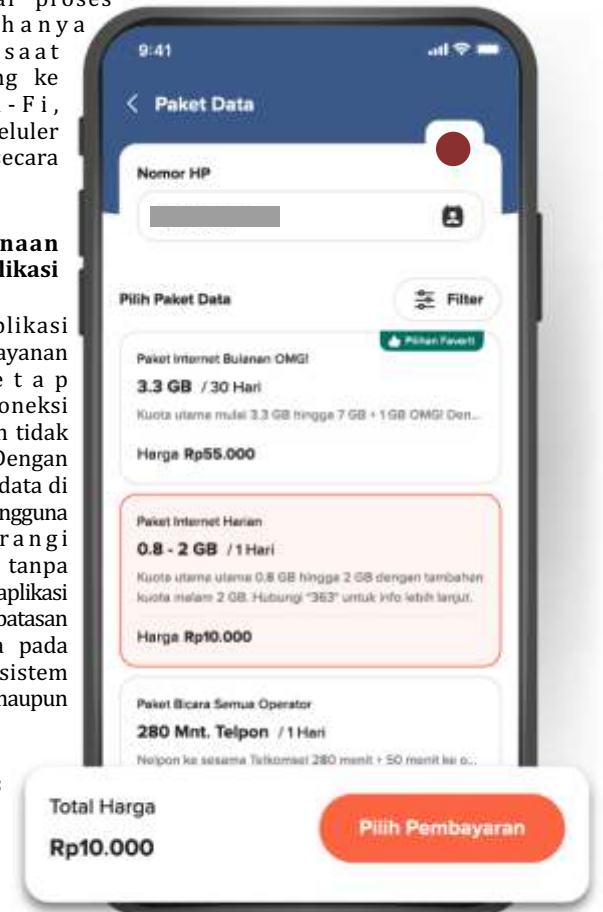
Batasi penggunaan internet pada aplikasi tertentu

Beberapa aplikasi media sosial dan layanan digital tetap menggunakan koneksi internet meskipun tidak sedang dibuka. Dengan membatasi akses data di latar belakang, pengguna dapat mengurangi konsumsi kuota tanpa harus menghapus aplikasi tersebut. Fitur pembatasan ini telah tersedia pada sebagian besar sistem operasi Android maupun iOS.

Turunkan kualitas streaming video

Menonton video menjadi salah satu

aktivitas yang paling banyak menghabiskan kuota internet. Jika tidak membutuhkan resolusi tinggi, ubahlah kualitas video ke 480p, 360p, atau mode otomatis. Perbedaan kualitas gambar sering kali tidak terlalu terlihat pada layar ponsel, tetapi penghematan kuotanya dapat sangat signifikan. (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDAARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAANG I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Sayonara Rambut Lepek

Cara Tepat Memakai Hair Oil

Ditengah membanjirnya produk perawatan kimiawi, hair oil atau minyak rambut kembali naik daun sebagai primadona. Formula ini menjanjikan hidrasi instan bagi helai-helai yang gersang dan kusam akibat paparan polusi maupun hantaman suhu alat penata rambut.

Namun, hair oil kerap dituduh sebagai biang keladi rambut berminyak dan kusam. Padahal, lewat takaran dan anatomi aplikasi yang tepat, ia adalah tameng terbaik pelindung kilau alami mahkota Anda.

Persoalan rambut lepek ini sering kali bukan bersumber dari kualitas minyak yang buruk, melainkan dari kekeliruan mendasar dalam mengenali karakter rambut dan teknik aplikasi. Formula minyak rambut bekerja dengan cara yang sangat personal. Karakteristik helai rambut setiap individu menuntut perlakuan, takaran, dan jenis ekstrak yang sepenuhnya berbeda.

"Hair oil bekerja dengan baik untuk semua jenis rambut, tetapi jumlah dan cara pemakaiannya perlu disesuaikan," kata hairstylist sekaligus pemilik salon Maven, Christine Bellemare, seperti dikutip dari Glamour.

Anatomi Tekstur dan Jenis Minyak

Langkah pertama dalam menginjakkan minyak rambut adalah memahami ketebalan dan porositas helai rambut Anda. Laporan dari berbagai media kecantikan arus utama menyebutkan bahwa kesalahan terbesar konsumen adalah menyamaratakan semua jenis minyak.

Bagi mereka yang dianugerahi rambut tipis atau berporositas rendah, memilih minyak yang pekat adalah sebuah kekeliruan fatal. Minyak berbobot berat hanya akan membebani batang rambut, menutup volume alaminya, dan mempercepat timbulnya kesan kotor.

Untuk tipe rambut tipis, para pakar menganjurkan penggunaan minyak bertekstur ringan (lightweight oils) seperti minyak jojoba (jojoba oil) atau minyak argan (argan oil).

Minyak jojoba memiliki struktur molekul yang paling menyerupai sebum alami kulit manusia, sehingga ia mampu terserap dengan cepat tanpa meninggalkan

lapisan lengket yang masif. Penggunaannya pun harus ekstra ketat, cukup satu hingga dua tetes untuk seluruh area yang membutuhkan.

Sebaliknya, bagi pemilik rambut tebal, ikal, atau cenderung keriting, helai rambut membutuhkan asupan kelembapan yang jauh lebih tinggi dan proteksi yang lebih kokoh.

Di sinilah minyak dengan viskositas tinggi seperti minyak jarak (castor oil) atau minyak kelapa murni (coconut oil) mengambil peran. Teksturnya yang pekat mampu menembus kutikula rambut yang tebal, meredam rambut yang mengembang liar, serta mengunci kelembapan di dalam korteks rambut dalam jangka waktu yang lebih lama.

Waktu Terbaik Aplikasi

Salah satu kekeliruan yang paling jamak ditemui di meja rias adalah mengoleskan minyak saat rambut masih basah kuyup sesuai keramas. Logika awam kerap membayangkan bahwa air akan membantu minyak merata. Padahal, secara hukum alam, air dan minyak tidak dapat bersatu. Ketika diaplikasikan pada rambut yang jenuh dengan air, molekul minyak terhalang untuk meresap ke dalam serat rambut.

Minyak yang tertahan di permukaan ini lambat laun akan menguap bersama air atau mengendap menjadi residu lengket begitu rambut mengering. Bellemare menegaskan bahwa aplikasi

terbaik justru dilakukan saat rambut telah berada dalam kondisi kering.

Pada kondisi ini, kutikula rambut siap menyerap nutrisi secara efisien, sehingga minyak mampu mengunci kelembapan internal, menghaluskan rambut yang mencuat (frizzy), dan memancarkan kilau alami yang tampak sehat.

Bahaya Suhu Tinggi

Lebih jauh lagi, hair oil dapat dialihfungsikan sebagai perisai preventif dalam ritual mandi. Bellemare menyarankan metode aplikasi sebelum keramas (pre-shampooing treatment), terutama bagi mereka yang memiliki rambut kasar, kering, atau rusak akibat proses pewarnaan.

Dengan mengoleskan minyak dari bagian tengah hingga ujung rambut beberapa menit sebelum mengguyurkan air, Anda sedang membangun benteng pelindung. Lapisan minyak ini berfungsi menahan agar formula surfaktan yang terkandung di dalam sampo tidak mengikis habis kelembapan dan

minyak alami (sebum) yang diproduksi oleh kulit kepala. Efeknya, rambut tetap bersih dari kotoran namun terhindar dari kekeringan ekstrem pasca-keramas.

Namun, satu lampu kuning yang wajib diperhatikan adalah pantangan menggunakan minyak rambut tepat sebelum mengeringkannya dengan hair dryer atau mencatoknya dengan alat pelurus rambut.

Riset industri kecantikan yang dirilis berbagai media arus utama menunjukkan bahwa sebagian besar produk minyak rambut di pasaran tidak dirancang sebagai agen pelindung panas (heat protectant).

Memapar rambut yang dilapisi minyak dengan suhu tinggi dari alat penata rambut sama saja dengan "menggoreng" helai rambut Anda sendiri secara perlahan. Hal ini justru berisiko tinggi merusak struktur keratin dan membuat ujung rambut menjadi bercabang serta patah.

Pada akhir ritis perawatan, kemewahan rambut yang sehat dan berkilau menggunakan hair oil bukan terletak pada seberapa mahal merek produk yang Anda beli.

Kuncinya ada pada ketepatan takaran, pemahaman anatomi rambut, dan disiplin membaca kebutuhan mahkota kepala Anda sendiri. (far,ist/dya)



Lagi! Sekolah Dibayangi,...dari hal 1

Senin pagi (13/7/6/2026), halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, riuh oleh ratusan murid baru yang antusias mengikuti upacara pembukaan MPLS. Namun, di tengah khidmatnya barisan, atmosfer mendadak pekat oleh ketegangan. Sekitar pukul 06.28 WIB, sebuah pesan singkat WhatsApp masuk ke gawai seorang guru kelas 1 dan seorang pegawai tata usaha (TU).

Pesan yang dikirim dari nomor tidak dikenal tersebut bernada dingin sekaligus mengancam:

"Selamat pagi dan salam sejahtera diharap bersiap-siap dengan hitungan menit tempat sekolahan SDN 15 Pagi ini akan meledak dan kami sudah menyiapkan 11 titik."

Tidak lama setelah melayangkan pesan tertulis, nomor asing tersebut sempat melakukan panggilan telepon ke salah satu guru, namun panggilan itu tidak diangkat. Satu jam berselang, pelaku kembali mengirimkan pesan gertakan. Kali ini, ia mengklaim sedang mengawasi pergerakan di sekolah dan dengan tegas melarang pihak sekolah melaporkan ancaman tersebut kepada aparat penegak hukum.

Demi menghindari kepanikan massal di antara ratusan murid, pihak sekolah mengambil langkah taktis yang krusial. Upacara bendera tetap dilanjutkan hingga selesai sembari secara senyap berkoordinasi dengan pengurus RT dan Polsek Jagakarsa. Begitu upacara usai, kegiatan MPLS hari itu resmi dibubarkan. Seluruh murid langsung diarahkan ke lapangan sebelum dipulangkan lebih awal kepada orang tua yang telah cemas menunggu di depan gerbang.

"Salah satu guru menerima pesan teror saat kami sedang melaksanakan upacara. Kami mengondisikan agar situasi tetap tenang. Sambil itu saya melapor kepada ketua RT dan Polsek. Kami juga mendapat imbauan dari kepolisian agar anak-anak tetap berada di lapangan dan tidak masuk ke kelas," ujar Subekhi, Guru Kelas V SDN Srengseng Sawah 15, menceritakan detik-detik mencekam tersebut.

Siaga 4 Jam dan Evakuasi Total

Laporan resmi yang diterima kepolisian pada pukul 07.30 WIB langsung memicu alarm bahaya. Markas Besar Polri merespons dengan menerjunkan tim gabungan berskala besar. Tim Penjinak Bom (Jibom) Satbrimob Polda Metro Jaya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, hingga empat ekor anjing pelacak (K-9) dikerahkan ke lokasi. Area jalan di sekitar sekolah pun dijaga ketat oleh petugas Dinas



Personel Gegana Brimob Polda Metro Jaya bersiaga saat melakukan penyisiran menyusul adanya ancaman dugaan bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta, Senin (13/7/2026). Personel Brimob menyisir seluruh area sekolah untuk memastikan keamanan lingkungan setelah pihak sekolah menerima ancaman dugaan bom melalui aplikasi percakapan. ANTARA

Perhubungan dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.

Seluruh guru, staf, dan siswa yang tersisa segera dievakuasi keluar dari kompleks sekolah demi keselamatan. Polisi memeriksa 16 ruangan di lingkungan sekolah dengan melibatkan Unit K-9 dan Satuan Penjinak Bom Pasukan Gegana. Dengan senjata api laras panjang dan dua unit mobil taktis yang terparkir di halaman, personel Brimob mulai menyisir sudut demi sudut bangunan. Dari ruang kelas, kantor tata usaha, laboratorium, hingga fasilitas sanitasi.

Penyisiran intensif tersebut berlangsung selama hampir empat jam. Beruntung, ketakutan akan adanya 11 titik ledak itu tidak terbukti. Tim Gegana menyatakan lingkungan SDN Srengseng Sawah 15 steril dari bahan peledak maupun benda mencurigakan lainnya.

"Untuk Gegana sendiri sudah menyisir sudah lebih kurang 2 jam lebih, ya, untuk menyisir SD Negeri Srengseng Sawah 15. Iya, dinyatakan aman dari Tim Gegana," kata Kapolsek Jagakarsa Kopol Nurma Dewi saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Namun, Nurma menegaskan bahwa fokus penyidikan kini beralih pada kemampuan pelaku memantau dinamika di lapangan secara detail melalui pesan-pesannya, termasuk saat mengetahui kedatangan Ketua RT ke sekolah. "Jadi kan itu yang harus kita dalam. Kok bisa dia bisa baca situasi," tambahnya. Untuk memperkuat bukti, polisi langsung menyita rekaman kamera pengawas (CCTV) di dalam dan sekitar lingkungan sekolah serta memeriksa lima orang saksi, termasuk guru dan

staf TU yang pertama kali menerima pesan tersebut.

Pelaku Ditangkap: Hanya Iseng

Jejak digital pelaku rupanya tidak bertahan lama. Melalui metode scientific crime investigation berbasis analisis forensik IT digital, kepolisian berhasil melacak keberadaan pelaku. Sekitar pukul 12.20 WIB, petugas berhasil membekuk pelaku tanpa perlawanan di Gang Kidan, Kampung Srengseng Sawah, tidak jauh dari lokasi sekolah.

Pelaku tersebut diketahui seorang pria berinisial MY (34). Ironisnya, MY bukan bagian dari jaringan terorisme global, melainkan warga sipil yang bekerja sebagai wiraswasta dan tinggal di sekitar lingkungan SDN Srengseng Sawah 15 itu sendiri. Saat ditangkap, polisi menyita sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp penyebar teror.

Saat diinterogasi awal, MY mengeluarkan dalih klasik, ia mengaku nekat menyebarkan ancaman bom massal tersebut hanya karena iseng. Namun, polisi tidak memercayai pengakuan tersebut begitu saja.

"Temuan awal hasil penyelidikan atau penyidikan kami, sementara hanya menyampaikan karena keisengan. Tapi sempat juga menyampaikan ada kekecewaan secara pribadi, tapi kekecewaan dalam hidupnya, bukan terhadap sekolah. Namun kami tidak percaya begitu saja dan kami terus melakukan pendalaman terhadap pelaku, kemudian background pelaku, dan keterhubungan pelaku dengan pihak-pihak yang lain," tegas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin.

Penyelidikan lebih lanjut justru mengungkap fakta mengejutkan mengenai rekam jejak pelaku. Aksi teror bom ini ternyata bukan yang

pertama bagi MY. Beberapa waktu lalu, ia diketahui pernah mengirimkan pesan ancaman bom serupa melalui aplikasi WhatsApp kepada Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Kala itu, aksi nekatnya tidak dilaporkan ke polisi lantaran Ketua RT mengenal MY secara pribadi dan memilih menyelesaikan masalah lewat komunikasi personal. Kasus lama ini baru terbongkar setelah polisi memeriksa riwayat digital ponselnya pascateror di sekolah.

Meskipun situasi di lingkungan SDN Srengseng Sawah 15 Pagi dipastikan sudah sepenuhnya aman dan kondusif berkat penjagaan ketat aparat Polsek Jagakarsa serta pendampingan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dampak psikologis pada anak-anak tidak dapat diabaikan.

Guna memulihkan ketenangan para siswa yang terdampak insiden tersebut di hari pertama sekolah mereka, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Metro Jaya bersama pihak terkait kini diterjunkan untuk memberikan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma (trauma healing).

Di sisi lain, hukum siap menjerat MY dengan konsekuensi yang sangat berat akibat perbuatannya. Polisi menerapkan pasal berlapis dari kitab undang-undang hukum pidana yang baru.

"Atas perbuatannya, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 600 dan atau Pasal 601 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi ancaman hukuman minimal lima tahun, maksimal 20 tahun," jelas Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi di markas Polres Jaksel.(wud,ist,rla,kum/dya)



DPRD Surabaya Nilai Sidak Eri Cahyadi Efektif

FATHONI: PELAYANAN PUBLIK HARUS RESPONSIF TERHADAP ADUAN WARGA

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai inspeksi mendadak (sidak) yang rutin dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi efektif untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pola kepemimpinan yang mengedepankan pengawasan langsung di lapangan menjadi dorongan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan warga.

Menurutnya, pola kepemimpinan tersebut mengombinasikan kerja administratif di balik meja dengan pengawasan langsung berbagai persoalan di lapangan.

Fathoni mengatakan, setiap perhatian dan keluhan masyarakat seharusnya menjadi energi bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan warga. Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut mampu beradaptasi dengan pola kepemimpinan yang diterapkan saat ini.

“Mas Wali mengombinasikan kerja di belakang meja dengan kerja lapangan. Mau tidak mau, organisasi perangkat daerah

harus beradaptasi dengan pola kepemimpinan tersebut,” kata Fathoni ketika ditemui Lentera, Senin (13/7/2026).

Menurut politikus Partai Golkar itu, setiap aparatur sipil negara (ASN) yang memilih menjadi pelayan masyarakat harus siap ditempatkan di mana pun. Selain itu juga mau menerima konsekuensi berupa penghargaan maupun sanksi sesuai kinerjanya.

Ia menjelaskan, inspeksi lapangan yang dilakukan wali kota bertujuan memastikan laporan yang diterima pemerintah sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

“Ketika wali kota melakukan tinjauan lapangan, itu untuk memastikan apakah yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan benar-benar linier,” jelasnya.

Fathoni menambahkan, sistem birokrasi modern tidak lagi hanya mengandalkan prosedur administratif. Menurutnya, birokrasi saat ini harus mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan solusi cepat dan konkret atas



Reward dan punishment adalah konsekuensi dalam birokrasi. Kalau tidak ada, orang akan enggan melakukan pembaruan dan peningkatan kompetensi.”

Arif Fathoni

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya



Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi, Surabaya, Jawa Timur. Dia menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang eks kaki Jembatan Suramadu yang direlokasi ke kawasan tersebut. (Ist)

berbagai persoalan.

“Keluhan publik harus dijadikan energi untuk melakukan pembaruan pelayanan. Indikator birokrasi yang melayani adalah sejauh mana ada inovasi dan sejauh mana mampu merespons kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Ia menilai, langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang membuka berbagai kanal pengaduan, termasuk hotline masyarakat, menuntut perangkat daerah bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan di tingkat bawah.

Imbauan untuk Camat-Lurah

Karena itu, Fathoni mengimbau para Camat dan Lurah untuk mulai memetakan berbagai persoalan yang kerap menjadi sorotan publik, seperti parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah.

“Nah, ujung tombak pelayanan masyarakat itu ada di kelurahan dan kecamatan. Camat dan lurah harus melakukan mitigasi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik,” katanya.

Menurutnya, keberadaan sistem penghargaan dan sanksi dalam birokrasi merupakan hal yang wajar untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tanpa

mekanisme tersebut, ASN dikhawatirkan enggan melakukan inovasi maupun meningkatkan kompetensi.

“Reward dan punishment adalah konsekuensi dalam birokrasi. Kalau tidak ada, orang akan enggan melakukan pembaruan dan peningkatan kompetensi,” tegasnya.

Ia juga menilai model kepemimpinan yang diterapkan Eri Cahyadi cukup efektif dalam mendorong jajaran birokrasi untuk terus berbenah. Apalagi, sidak yang dilakukan wali kota kerap berlangsung secara spontan tanpa melalui agenda resmi.

“Paling tidak, pola kepemimpinan seperti ini memacu aparatur di bawahnya untuk berbenah. Jangan sampai birokrasi hanya memperbaiki keadaan ketika ada kunjungan resmi,” ujarnya.

Fathoni menuturkan, birokrasi harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, pola pelayanan yang terlalu prosedural sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan publik saat ini.

“Dulu keluhan masyarakat diselesaikan dengan cara-cara birokrasi yang panjang. Sekarang masyarakat menginginkan tindakan yang cepat, konkret, dan komprehensif. Karena itu, birokrasi juga harus ikut berubah agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman,” pungkasnya. (adv/ama/dya)